

Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Menunjang Program Pembangunan Fisik dan Non Fisik

Oleh:

¹Paul Adryani Moento; ²Erwin Nugraha Purnama; ³David Laiyan; ⁴Adrianus;
⁵Abdul Rizal

¹²³ Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus

⁴ Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Musamus

⁵ Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Musamus

E-mail : abdulrizal@unmus.ac.id

Abstrak

Salah satu penyebab realisasi pembangunan yang tidak mengarah pada partisipasi masyarakat petani yaitu disebabkan karena masyarakat petaninditempatkan sebagai pelaku utama program pembangunan dan pemerintah tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap program pembangunan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat petani dan pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun non fisik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan tipe deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara umum dapat dikatakan cukup baik dengan menunjukkan antusias yang tinggi saat perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan program pembangunan tidak berpartisipasi penuh karena sikap masyarakat yang tidak memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan maupun dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk pemanfaatan hasil pembangunan sangat tinggi karena membantu merawat, dan menjaga agar hasil pembangunan tetap ada sehingga dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan tergolong cukup baik dengan mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Saran penulis yaitu agar setiap perencanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik harus melibatkan partisipasi masyarakat petani.

Kata Kunci: Partisipasi; Masyarakat Petani; Pembangunan

Abstract

One of the causes of the realization of development that does not lead to the participation of the farming community is because the farming community is placed as the main actor in the development program and the government is no longer the provider, but rather acts as an intermediary and catalyst for all development programs. participation of farming communities and implementation of development programs, both physical and non-physical. The method used in this study uses a descriptive type approach, namely research that describes or describes a certain situation based on the data obtained in detail according to the problems specified. The results of the study show that community participation in the implementation of decision-making in general can be said to be quite good by showing high enthusiasm during development planning. In the implementation of development programs, they do not fully participate because of the attitude of the community that does not respond to development plans or in the formulation and implementation of development activities. The utilization of the development results is very high because it helps to maintain and keep the development results so that they can be used again by the community. Meanwhile, community participation in the evaluation of development is quite good by assisting the government in the implementation of development. The author's suggestion is that every development planning, both physical and non-physical, must involve the participation of the farming community.

Keywords: Participation; Farming Societ; Development

PENDAHULUAN

Merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dimana salah satu kebijakan otonomi diarahkan pada pencapaian “peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat” terlihat jelas pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya masing-masing (Aditya *et al.*, 2020). Pemberdayaan masyarakat dalam program pembangunan adalah paradigma baru yang dibangun dan didorong oleh pemerintah dalam mengoptimalkan setiap usaha dalam rangka pelaksanaan program pembangunan.

Paradigma pembangunan yang dikembangkan sekarang ini adalah paradigma pemberdayaan yang berlandaskan kepada partisipasi masyarakat termasuk masyarakat petani. Masyarakat petani ditempatkan sebagai pelaku utama program pembangunan dan pemerintah dan tidak lagi sebagai provider, tetapi lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator segenap program pembangunan. Artinya pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus dan kepercayaan serta yang tidak kalah penting adalah kesempatan yang lebih banyak bagi masyarakat petani, dalam rangka menumbuhkan kembangkan potensi-potensi yang ada pada mereka dan yang ada dilingkungan masyarakat (Endah, 2020). Dalam arti lain bagaimana menyesuaikan agar pembangunan menjadi bagian kegiatan dari rakyat, sehingga mereka berperan sebagai subyek dalam pembangunan yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan tersebut.

Pembangunan yang partisipatif harus dimulai dengan keterlibatan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya serta kondisi lingkungannya. Masyarakat petani adalah salah satu pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan pendapat (Latif, *et.,al*, 2019; Aini, 2019) bahwa partisipasi masyarakat dalam aspek pembangunan merupakan strategi dan proses penentuan keputusan publik.

Perkembangan masyarakat petani sebagai hasil dari adanya proses perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya semakin ditunjang oleh teknologi yang maju sehingga menuntut adanya perkembangan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan untuk menangani proses pembangunan itu sendiri. Siklus interaksi antara pemerintah dan masyarakat pada gilirannya mendorong adanya pemikiran-pemikiran baru dalam memahami, menelaah dan memecahkan berbagai masalah pembangunan di daerah (Herman, 2019). Lebih lanjut dikatakan bahwa aspek keterlibatan (partisipasi) masyarakat sangat minim sehingga mempengaruhi pelaksanaan dari pembangunan yang telah diprogramkan.

Tidak tercapainya program pembangunan diakibatkan oleh berbagai macam faktor, baik teknis dan non teknis yang penyebabnya juga dapat berasal dari pemerintah sebagai perencana pembangunan maupun masyarakat sebagai pelaku dan eksekutor pembangunan (Latif, *et.,al*, 2019; Aini, 2019). Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara pemberdayaan setiap komponen masyarakat petani (Riskayanti, 2021).

Pembangunan yang partisipatif harus dimulai dengan keterlibatan masyarakat termasuk masyarakat petani sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya serta kondisi lingkungannya. Masyarakat petani adalah salah satu pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat petani dan dapat mendukung tujuan pemerintah. Banyaknya pembangunan yang dilaksanakan di Kampung Muram Sari seperti lapangan futsal, lapangan bola voli, gedung serba guna maupun lainnya dianggap tidak mendukung aktifitas petani dalam menjalankan usaha taninya. Hal ini searah dengan pemahaman (Riskayanti, 2021) bahwa pembangunan yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah adalah pembangunan yang dapat menunjang aktifitas masyarakat.

Banyaknya realisasi pembangunan yang ada di Kampung Muram Sari yang tidak mengarah pada partisipasi masyarakat petani disebabkan karena masyarakat hanya sebagai pelaku utama program pembangunan sedangkan pemerintah tidak lagi sebagai provider, melainkan lebih bertindak sebagai intermediasi dan katalisator. Disisi lain, di Kampung Muram Sari ada kecenderungan bahwa usulan yang diajukan dalam musrenbang merupakan rumusan elit kampung, sehingga partisipasi masyarakat petani yang sesungguhnya masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat ketika proses musrenbang, tidak ada acara penentuan prioritas kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam forum karena daftar usulan kegiatan sebagai hasil musrenbang yang akan diusulkan sudah diprint out oleh pihak panitia musrenbang (Fitri dan Magriasti, 2019). Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat petani dan pelaksanaan program pembangunan baik fisik maupun non fisik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Muram Sari Distrik Semangga Kabupaten Merauke. Kampung ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan merupakan daerah transmigrasi dan didasarkan pada beberapa pertimbangan pengetahuan dasar tentang adanya fenomena dan masalah yang layak diteliti, seperti belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu penentuan informan penelitian

secara sengaja. Informan penelitian berjumlah minimal 31 orang yang terdiri dari Ketua Kelompok Tani, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Kampung Muram Sari. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dengan pendekatan tipe deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi tertentu sesuai data yang diperoleh secara terperinci dengan permasalahan yang sudah ditetapkan. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat petani meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan perencanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Sedangkan program pembangunan meliputi pembangunan fisik dan non fisik.

Partisipasi Masyarakat

Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, masyarakat petani akan dinilai dari partisipasi masyarakat petani pada saat mengikuti rapat perencanaan serta partisipasi dalam memberikan bantuan tenaga, ide maupun materi saat perencanaan pembangunan. Didalam rapat perencanaan pembangunan, secara umum masyarakat petani sering mengikuti rapat. Hal ini disebabkan karena masyarakat sadar akan pentingnya peran masyarakat dalam penentuan arah pembangunan di daerahnya. Tetapi ada sebagian kecil masyarakat petani yang jarang mengikuti rapat karena sibuk dengan bekerja sehingga jarang mengikuti rapat perencanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat. Kondisi ini sesuai dengan pendapat (Rismanita dan Pradana, 2022; Mashuri, 2014) bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan pembangunan menunjukkan kesadaran dan kepedulian untuk kemajuan daerahnya. Senda dengan pendapat dari Hubertus Oja dan Hesty Tambajong menegaskan bahwa Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas, maka masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan.

Pelaksanaan Perencanaan

Pada saat rapat mengenai perencanaan pembangunan, masyarakat petani memiliki partisipasi tinggi. Akan tetapi saat pelaksanaan pembangunan masyarakat petani tidak berpartisipasi penuh. Rendahnya antusias masyarakat petani memberikan saran, juga terlihat dari sikap yang tidak memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan maupun dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang atau telah berlangsung. Rendahnya kemampuan dan antusias dalam memberikan saran dan tanggapan bagi perencanaan dan perumusan kegiatan

pembangunan disebabkan karena tidak ada informasi tentang apa yang menjadi agenda dari pihak pemerintah. Selain itu, kesibukan masyarakat petani dalam mencari hidup sehingga kurangnya partisipasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kemampuan memberikan saran, ide dan tanggapan dalam rangka pembuatan keputusan dalam kegiatan pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat petani memberi pengaruh terhadap partisipasi saat pelaksanaan pembangunan.

Hubertus Oja, F Lamalewa. (2017) bahwa dalam meningkatkan kesadaran akan produktivitas, efektifitas, efisiensi serta etos kerja yang tinggi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan antara lain melalui program pelatihan bagi masyarakat petani meningkatkan hasil pertanian. Melalui pelatihan bagi para petani dapat meningkatkan kemampuan dalam berkerja dan berperan serta dalam pembangunan sehingga dapat berhasil bagi dirinya serta masyarakat secara keseluruhan. Upaya meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelolah lahan pertanian belum dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan pola pelatihan bagi masyarakat petani belum menjadi focus perhatian tersendiri dari Dinas terkait dan juga pemerintahan Kampung.

Selain itu, kesibukan masyarakat petani dalam menjalani profesinya sebagai petani yang menjadi penghambat utama dalam berpartisipasi saat pelaksanaan pembangunan. Masyarakat petani tidak berpartisipasi penuh dalam perencanaan pembangunan biasanya sibuk dan kelelahan dalam mengelolah usaha taninya (Karmila, et al, 2022; (Dali, 2016). Oleh karena itu walaupun mengikuti perencanaan pembangunan, belum tentu masyarakat akan mengikuti pelaksanaan pembangunan disebabkan karenat masih berada disawah atau dilahan pertaniannya.

Menikmati Hasil

Kemudian untuk menilai pemeliharaan fasilitas yang telah dibuat sebelumnya, masyarakat petani turut dalam membantu pemerintah dalam memelihara dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan. Partisipasi masyarakat petani untuk memelihara dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai ditunjukkan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil pembangunan dengan baik, membantu merawat, dan menjaga agar hasil pembangunan tetap ada sehingga dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Secara umum masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah kampung dalam merealisasikan pembangunan. Meskipun masyarakat petani tidak berpartisipasi penuh akan tetapi diberi ruang untuk menikmati pembangunan yang direalisasikan oleh pemerintah. Pembangunan yang dimaksud adalah pembuatan masjid, bantuan pupuk, jalan usaha tani, dan pembersihan berbagai sarana umum.

Setiap pembangunan yang digagas dan direalisasikan oleh pemerintah kampung, dilakukan sesuai hasil musyawarah dan gagasan bersama. Pembangunan yang dilakukan memiliki tujuan untuk digunakan oleh masyarakat petani sesuai dengan pemanfaatannya. Seperti halnya pembangunan masjid di Kampung Muram Sari, dimana masyarakat

memiliki hak untuk menggunakan masjid, demikian pula dengan pengadaan dan bantuan lainnya. Masyarakat petani tetap diberi hak yang adil dalam menikmati hasil pembangunan. Selain menikmati hasil pembangunan, masyarakat juga ikut merawat dan menjaga hasil-hasil pembangunan. Merawat dan menjaga merupakan suatu keharusan bagi setiap masyarakat untuk melaksanakannya sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama (Nain, 2019).

Evaluasi

Partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan yaitu partisipasi perencanaan, partisipasi pelaksanaan, dan partisipasi menikmati hasil. Selain itu, masyarakat dapat juga berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan. Evaluasi merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pembangunan, dimana partisipasi ini ditunjukkan dengan memberikan *feedback* atau saran serta membantu pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Muram Sari tergolong cukup baik. Dalam artian bahwa masyarakat sudah menjalankan evaluasi pembangunan sesuai dengan semestinya seperti memberikan *feedback* kepada pemerintah terkait pembangunan yang telah dilakukan, mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan mencapai target yang telah ditetapkan. Tetapi partisipasi masyarakat petani dalam evaluasi pembangunan hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat petani saja. Hal ini juga terjadi pada masyarakat petani dimana mereka juga kurang berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan. Hal ini disebabkan kurangnya waktu yang dimiliki oleh masyarakat petani jika turut dalam partisipasi evaluasi pembangunan (Dali, 2016).

Sempitnya waktu yang dimiliki masyarakat petani menghambat untuk partisipasi dalam pembangunan di Kampung Muram Sari. Hal ini disebabkan masyarakat petani hanya menghabiskan waktu kebanyakan untuk mengolah usaha taninya, jadi waktu buat melakukan evaluasi pembangunan sangat terbatas. Selain itu, biasanya saat pergi bertani mulai pagi sampai siang hari bahkan sampai sore. Hal ini mengakibatkan waktu masyarakat petani untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi kurang optimal. Selain sempitnya waktu masyarakat petani, faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat petani dalam evaluasi pembangunan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat petani. Rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memberikan saran-saran kepada pemerintah terhadap pembangunan yang telah dilakukan (Lisnawati dan Lestari, 2019).

Evaluasi pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat petani di Kampung Muram Sari dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan sempitnya waktu yang dimiliki

masyarakat petani untuk berpartisipasi dalam evaluasi pembangunan, dan rendahnya kualifikasi pendidikan. Hal ini berdampak pada kurangnya penyampaian saran dan kritik terhadap pembangunan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang ada di Kampung Muram Sari Distrik Semangga Kabupaten Merauke dalam pembangunan yaitu sebagai berikut (a) Partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran seperti sumbangan ide saat rapat pembangunan dan pada saat evaluasi pembangunan, (b) Partisipasi dalam bentuk tenaga seperti kerja bakti, dan pembangunan masjid, (c) Partisipasi dalam bentuk materi seperti iuran kampung, sumbangan makanan maupun minuman saat melaksanakan pembangunan.

Program Pembangunan

Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik di Kampung Muram Sari yaitu melaksanakan pembangunan mesjid, pembangunan gedung serba guna, sarana dan fasilitas olahraga, drainase, dan perbaikan jalan kampung. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan tugas-tugas pembangunan fisik berupa pembangunan yang direncanakan berjalan dengan baik dan memperhitungkan aspek swadaya masyarakat petani, walaupun masih terdapat beberapa konsep pelaksanaan yang belum dapat diteruskan ke dalam perumusan program. Adanya pembangunan fisik tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat petani. Pembangunan dalam bentuk fisik yang direalisasikan oleh pemerintah di Kampung Muram Sari memiliki target untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan yang ada di Kampung Muram Sari Distrik Semangga sangat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Dimana pembangunan berbagai tempat ibadah memudahkan masyarakat petani dalam melakukan ibadah, begitu juga dengan pembangunan berbagai sarana fasilitas umum lainnya seperti pembangunan mesjid, drainase, perbaikan jalan, pembangunan gedung serba guna, lapangan futsal, lapangan bola voli dan lain-lain. Oleh karena itu, berbagai sarana dan prasarana yang telah dibangun harus dilakukan perawatan yang kontinu agar bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama (Lisnawati, 2019)

Pembangunan Non Fisik

Pembangunan non fisik mengarah pada kondisi lingkungan pemerintahan yang aman, kondusif sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang dengan sumberdaya aparat kampung yang baik, dimana mayoritas memiliki pendidikan sarjana. Pembangunan non fisik salah satunya adalah terciptanya pelayanan administrasi yang baik. Sebagai kampung yang berkembang dan maju maka tentunya peningkatan pelayanan pegawai sangat perlu dimaksimalkan agar segala kepentingan masyarakat yang berhubungan dengan administrasi dapat berjalan lancar (Teturan, 2021).

Pembangunan non fisik di Kampung Muram Sari Distrik Semangga seperti, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, peningkatan ekonomi masyarakat dan sosial kemasyarakatan sudah baik. Hal ini terlihat dari aparat kampung yang ramah

saat melayani masyarakat, adanya kerjasama masyarakat petani dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Kualitas pelayanan pegawai terjadi peningkatan karena ditunjang dengan pendidikan yang dimiliki dimana mayoritas aparat kampung adalah lulusan S1. Keadaan lingkungan yang ramah, saling kerjasama dan kondusif merupakan gambaran kondisi pembangunan non fisik (Lisnawati, 2019).

Pembangunan non fisik di Kampung Muram Sari Distrik Semangga termasuk dalam kategori yang baik. Kondisi ini sesuai dengan ungkapan beberapa responden responden yang mengatakan bahwa adanya peningkatan kualitas pelayanan, serta lingkungan disekitar masyarakat petani sudah aman dan nyaman. Jenis pembangunan non fisik yang ada di Kampung Muram Sari yaitu terjadinya peningkatan kualitas pelayanan aparat kampung.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengambilan keputusan secara umum dapat dikatakan cukup baik dengan menunjukkan antusias yang tinggi saat perencanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan program pembangunan tidak berpartisipasi penuh. Hal ini terlihat dari sikap masyarakat yang tidak memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan maupun dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sedang atau telah berlangsung. Untuk pemanfaatan hasil pembangunan sangat tinggi hal ini dapat dilihat dengan kondisi membantu merawat, dan menjaga agar hasil pembangunan tetap ada sehingga dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan tergolong cukup baik. Dalam artian bahwa masyarakat sudah menjalankan evaluasi pembangunan sesuai dengan semestinya seperti memberikan *feedback* kepada pemerintah terkait pembangunan yang telah dilakukan, mendampingi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga pembangunan yang dilakukan mencapai target yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, sebaiknya informasi terkait rapat perencanaan pembangunan disebarkan dengan merata dan jelas, sehingga masyarakat paham tentang agenda rapat yang akan dilakukan di Kampung Muram Sari. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, maka diharapkan pegawai dapat mempertahankan hasil-hasil kerja yang telah dicapai dan meningkatkan lagi berbagai hal yang dirasa masih perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Latif, Irwan, Muhammad Rusdi, Ahmad Mustanir, M. S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidereng Rappang. *MODERAT*, 5(1), 1–15.
- Aditya, D., Surya, P., Esthi, T., Indra, M., & Wijaya, H. (2020). Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Temanggung). *Pengembangan Daerah*, 1(November), 36–44.

- Aini, S. (2019). *Kapasitas Sumber Daya Manusia Pokdarwis Dalam Pengelolaan Wisata (studi Kasus Wisata Bukit SJ 88 Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember)*.
- Dali, Z. (2016). Hubungan Antara Manusia, Masyarakat, dan Budaya Dalam Perspektif Islam. *NUANSA*, IX(1), 47–57.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *MODERAT*, 6, 135–143.
- Fitri, A. L., & Magriasti, L. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) di Nagari Sungai Nanam Kabupaten Solok. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(3), 109–120.
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang KecamatanTammerodo KabupatenMajene. *Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 75–98.
- Hubertus Oja, H Tambajong. (2015).Strategi pendekatan participatory rural appraisal (PRA) dalam mewujudkan kemandirian masyarakat transmigrasi di kampung Marga Mulia Distrik Semangga. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 4 (2), 114-131
- Hubertus Oja, F Lamalewa. (2017) Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Berbasis Kelompok Usaha Tani Dalam Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Kampung Marga Mulia, Kabupaten Merauke. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial* 6 (2), 78-88
- Lisnawati, S. L. (2019). Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 157–167.
- Mashuri. (2014). Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi. *Menara Riau*, 13(2), 178–186.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*.Garis Khatulistiwa. Makasar.
- Riskayanti. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Romanglasa Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa*.
- Rismanita, E., & Pradana, G. W. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Jaya Tirta Desa Gedongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 10(1), 149–158.
- Teturan, Y. E. (2021). *Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan*. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*. Vol 10 Nomor 2, 112–127.